

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEKERJAAN TUKANG GIGI MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERIZINAN, PEKERJAAN TUKANG GIGI DI KOTA YOGYAKARTA

### INTISARI

Oleh:

**Gabriella Sekar Mayang Bestari<sup>1</sup>, R.A Antari Innaka Turingsih<sup>2</sup>**

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa tukang gigi yang melakukan pekerjaannya di luar kewenangannya dan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan perizinan pekerjaan tukang gigi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris yang terdiri dari pertama, penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kedua, penelitian lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data primer. Teknik sampling dalam penelitian lapangan penulisan hukum ini menggunakan *purposive sampling*. Subyek penelitian penulisan hukum ini yakni responden dan narasumber yang mana penulisan hukum ini dianalisis menggunakan metode analisis pendekatan kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, konsumen yang dirugikan atas tindakan di luar kewenangan tukang gigi dapat menuntut kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas dasar perbuatan melawan hukum kepada tukang gigi. Kedua, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tidak pernah mengeluarkan izin usaha tukang gigi, tidak pernah melakukan pembinaan, pengawasan hanya pernah dilakukan sekali atas aduan dari masyarakat.

Kata kunci: tukang gigi, perlindungan konsumen, pembinaan, pengawasan, perizinan.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Sarjana Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, Universitas Gadjah Mada.

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, Universitas Gadjah Mada.

**JURIDICAL REVIEW OF DENTAL ARTISAN’S JOB  
IMPLEMENTATION ACCORDING TO THE REGULATION OF  
MINISTER OF HEALTH NUMBER 39 OF 2014 CONCERNING THE  
DEVELOPMENT, SUPERVISION, AND LICENSING OF DENTAL  
ARTISAN IN YOGYAKARTA**

**ABSTRACT**

**Gabriella Sekar Mayang Bestari<sup>3</sup>, R.A Antari Innaka Turingsih<sup>4</sup>**

This law research is aimed to find the legal protection for the customer who uses dental artisan service when the dental artisans perform their job out of their authorities and to perceive the implementation of the development, supervision, and licensing of dental artisan done by Yogyakarta Health Agency according to the Regulation of Minister of Health Number 39 of 2014 regarding the Development, Supervision, and Licensing of Dental Artisan.

This is a normative-empirical research. This research divided into two board: first, library research that needs primary sources, secondary, and tertiary resources. Second, field research to gain primary source that would rely on interview with respondents and interviewees. This research uses purposive sampling method that applies qualitative analysis.

The conclusions of this research are: first, customer who is aggrieved by the act which is out of the dental artisan’s authority has the right to demand compensation, amends, and/or replacement on the basis of acts against the law to the dental artisan. Second, Yogyakarta Health Agency has never issued a dental artisan business permit, never held a coaching, and a supervision has ever be done once on complaints from the public.

**Keywords:** dental artisan, customer protection, development, supervision, licensing.

---

<sup>3</sup> Undergraduate Student of Law, Concentrating on Civil Law, Universitas Gadjah Mada.

<sup>4</sup> Supervising Lecturer of Legal Writing, Concentrating on Civil Law, Universitas Gadjah Mada.